

Jakarta, 1 Juli 2022/1 July 2022

Nomor / Number : 1279/692/DCS/2022
Lampiran / : 1 (Satu) Dokumen 1 (One) Document
Attachment
Perihal / Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material PT Aneka Tambang Tbk sehubungan dengan Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Pertambangan Nikel
Information Disclosure or Material Facts of PT Aneka Tambang Tbk in connection with the Announcement of the Abridged Spin-off Plan for the Nickel Mining Business Segment

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta

**U.p./Attn.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/
Executive Head of Capital Market Supervisory**

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta

**U.p./Attn.: Direktur Penilaian Perusahaan/
Director of Corporate Appraisal**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Referring to: (i) Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 31/2015**"), (ii) Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 of 2021 dated 29 January 2021 on the Amendment of Regulation Number I-E on the Obligations to Submit Information ("**Regulation I-E**"), we hereby convey the following:

1

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	1 Juli 2022	1 July 2022
2.	Jenis informasi atau fakta material / <i>Type of information of material facts</i>	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan	Announcement of the Abridged Spin-off Plan
3.	Uraian informasi atau fakta material / <i>Details of information or material facts</i>	Pada tanggal 1 Juli 2022, PT Aneka Tambang Tbk (" Perseroan ") telah mengumumkan ringkasan rencana pemisahan sebagian segmen usaha pertambangan nikel kepada 2 (dua) anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Nusa Karya Arindo (" NKA ") dan PT Sumberdaya Arindo (" SDA "), yang merupakan bagian dari rencana penyertaan modal dalam bentuk lain selain tunai (" Rencana Pemisahan ") pada surat kabar harian Media Indonesia sebagaimana terlampir.	On 1 July 2022, PT Aneka Tambang Tbk (the " Company ") has announced the abridged spin-off plan for the nickel mining business section to its 2 (two) subsidiaries, namely PT Nusa Karya Arindo (" NKA ") and PT Sumberdaya Arindo (" SDA "), which are part of the plan for equity participation in the form of other than cash (in-kind contribution) (" Spin-off Plan ") in the daily newspaper of Media Indonesia as attached.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The impact of such material event, information or fact to the Company's operational activities, legal, financial condition, or business continuity.</i>	Rencana Pemisahan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut: 1. Optimalisasi pengelolaan aset Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP"): anak perusahaan diharapkan dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan aset WIUP yang lebih intensif dan efektif kedepannya, sehingga pemanfaatan aset nikel dapat dilakukan secara optimal untuk menghasilkan produk – produk akhir dari komoditas nikel yang berkualitas tinggi dan mendukung inisiatif hilirisasi nikel. 2. Akselerasi dan diversifikasi pengembangan usaha: anak perusahaan yang menerima pemisahan juga diharapkan untuk menjadi lebih fokus, kompetitif, dan fleksibel dalam pengambilan keputusan dan peluang bisnis. Selain itu, rencana pemisahan	This Spin-off Plan is expected to provide number of benefits as follows: 1. Optimization of Mining Business License Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan or "WIUP") asset management: subsidiaries are expected to be able to develop and manage WIUP assets more intensively and effectively in the future, so that nickel asset utilization can be carried out optimally to produce high quality nickel end products and support nickel downstream initiatives. 2. Acceleration and diversification of business development: subsidiaries that receive the spin-off are also expected to be more focused, competitive, and flexible in decision-making and business opportunities. In addition, the

		merupakan salah satu upaya diversifikasi pengembangan usaha, khususnya sebagian segmen usaha nikel yang harapannya dapat mendukung inisiatif hilirisasi nikel. 3. Potensi kerja sama strategis: anak perusahaan yang menerima pemisahan diharapkan dapat membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi produk anak perusahaan dan memperkuat rantai pasok produksi komoditas nikel. 4. Penciptaan nilai tambah untuk pemegang saham: Terciptanya optimalisasi pengelolaan aset, akselerasi dan pengembangan usaha, dan potensi kerjasama strategis diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sebagai tujuan akhir dari pemisahan. Dengan demikian, Rencana Pemisahan sebagai salah satu bentuk dari inisiatif hilirisasi komoditas nikel merupakan langkah strategis Perseroan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem industri baterai untuk kendaraan listrik nasional.	spin-off plan is one of the efforts to diversify business development, especially for some of the nickel business segment, which is expected to support nickel downstream initiatives 3. Potential for strategic cooperation: subsidiaries that receive the spin-off are expected to open up opportunities for strategic cooperation to create added value for the subsidiary's products and strengthen the supply chain for nickel commodity production. 4. Creation of added value for shareholders: Optimization of asset management, business acceleration and development, and potential for strategic cooperation is expected to improve financial performance and create added value for shareholders as the ultimate goal of the spin-off. Thus, the Spin-off Plan as a form of nickel downstream initiative is a strategic step for the Company that can contribute to the development of the battery industry ecosystem for national electric vehicles.
5.	Keterangan lain-lain / Others	Tidak ada.	None.

Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Thus, we informed this Information Disclosure in order to comply with OJK Regulation 31/2015 and Regulation I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami/*Yours faithfully*,
PT Aneka Tambang Tbk



Syarif Faisal Alkadrie
Corporate Secretary Division Head

DEFINISI DAN SINGKATAN			
BEI atau Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempermudah penawaran jual dan beli efek phak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengantarnya dan penerima hak dan kewajibannya.	
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.	
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	
Grup MIND ID	:	PT Indonesia Asah Aluminium (Persero) dan anak-anak perusahaannya.	
Kemerkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.	
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.	
Merumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.	
NKA	:	PT Nusa Karya Arindo.	
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan fungsi dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.	
Pemisahan	:	Pemisahan sebagian usaha pertambangan nikel Perseroan dengan cara mengalihkan sebagian aset dan liabilitas yang terkait dengan usaha pertambangan nikel Perseroan yang berlokasi di Halmaheira Timur, Maluku Utara, kepada NKA dan SDA, anak perusahaan terkendali Perseroan yang keduanya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.	
Perseroan	:	PT Aneka Tambang Tbk.	
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak.	
PKH 56 Tahun 2021	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK/010/2017 tentang Pengaturan Nilai Bukti Pajak atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK/010/2021.	
POJK No. 33/2014	:	Peraturan OJK No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.	
POJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK/04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 22 Desember 2015.	
POJK No. 30/2017	:	Peraturan OJK No. 30/POJK/04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 22 Juni 2017.	
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.	
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kebijakan Usaha tanggal 21 April 2020.	
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Berpotensi Konflik tanggal 2 Juli 2020.	
PP 34/2016	:	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Penjabarannya.	
PPH	:	Pajak Penghasilan.	
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai.	
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	
Rancangan Pemisahan	:	Rancangan Pemisahan yang disiapkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
RUPS/LB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang bertujuan untuk menyetujui rencana Pemisahan yang dilaksanakan akan diadakan pada tanggal 23 Agustus 2022.	
SDA	:	PT Sumberdaya Arindo.	
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.	
Undang-Undang Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 Tahun 2020.	
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.	
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.	
UU PPh	:	Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246 Tahun 2021, Tambahan No. 6736.	
UU PPN	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246 Tahun 2021, Tambahan No. 6736.	
UUP	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja.	

Judul/judul dan klausula-klausula pada Rancangan Pemisahan ini hanya dimaksudkan sebagai kemudahan dalam melakukan rujukan saja dan tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi Rancangan Pemisahan ini.

Rancangan Pemisahan ini dibuat dengan mengacu pada UUP/Rancangan Pemisahan ini disusun dan dilaksanakan kepada pihak terkait, publik dan pegawai Perseroan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rancangan Pemisahan ini dimaksudkan untuk dibuat secara rasional termasuk di dalamnya pemberitahuan mengenai waktu yang diberikan kepada semua pihak, khususnya bagi kreditur Perseroan untuk mengajukan keberatan (opt-out) atau sebaliknya.

BAB I PENDAHULUAN

Pemisahan lingkungan aset ini merupakan tindakan dari pelaksa secara bersamaan. Pemisahan lingkungan yang ada berupa emisi gas rumah kaca terhitung sebanyak 42 gton yang diinduksi oleh perubahan massa. Menurut sumber data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebanyak 23% (dua puluh tiga persen) dari angka tersebut, merupakan salah satu bagian dari kendaraan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dampak ini berskala regional mengingat temperatur bumi mengalami 4 (empat) °C yang dapat berdampak pada pencaran gelombang inframerah akan secara sangat cepat yang dapat berdampak pada bencana alam.

Pada tahun 2017, total emisi gas CO2 yang terdapat di dunia adalah sebanyak 36,2 miliar ton dimana 7 miliar ton atau sekitar 53% (lima puluh tiga persen) dari total produksi CO2 secara global, diproduksi oleh China. Indonesia pada tahun ini memproduksi gas CO2 sebanyak 487 juta ton. Emisi yang berasal dari rumah kaca tersebut didominasi dari pembakaran bahan bakar fosil dari modal komersial, bukan, keneat, api, dan pesawat yang gas rumah kaca tersebut dapat menyiratkan banyak beban sosial.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan sekaligus peluang untuk Grup MIND ID (dalam hal ini diwakili oleh Perseroan) untuk menginisiasi rencana pengembangan energi berkelanjutan.

Salah satu pengembangan energi berkelanjutan adalah dengan mengembangkan ekosistem electric vehicle (EV). Pada awal tahun 2020, telah diinisiasi perjalanan dari pengujian EV pada skala komersial. Menurut Asosiasi Busan Consulting, Group, tren penggunaan EV akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan estimasi pengunaan EV pada tahun 2035 sebanyak 90% yang tidak akan pengunaan Hybrid & Mid Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV).

Peningkatan trend penggunaan EV membuat adanya peningkatan kebutuhan dari penyediaan baterai (EV Battery) sebagai sumber energi dari EV. Adapun bahan baku utama dari pembuatan EV Battery adalah nikel. Menurut sumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pertumbuhan energi berkelanjutan penyediaan baterai merupakan peningkatan sebanyak 70% (tujuh puluh sembilan persen) per tahun. Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat merupakan tiga negara yang mengalami pertumbuhan terbesar, dengan kapasitas baterai EV sebesar 1.787 MWh dapat diproduksi oleh China, Jepang, 1.397 MWh dapat diproduksi oleh Jepang dan 1.270 MWh dapat diproduksi oleh Amerika Serikat. Di lain pihak, China dapat memproduksi baterai EV dengan kapasitas 705 MWh.

ANTAM sebagai pemilik sumber daya nikel terbesar kedua di Indonesia memiliki inisiatif untuk memanfaatkan momentum peningkatan trend penggunaan EV dengan berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem industri EV Battery. Setelah saat ini, para Perseroan untuk mendukung penggunaan EV Battery sebagai pengembangan energi berkelanjutan yang terkait dengan usaha pertambangan nikel Perseroan yang berlokasi di Halmaheira Timur, Maluku Utara, kepada anak perusahaannya yaitu NKA dan SDA. Adapun manfaat dari pemisahan ini adalah (i) untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan aset yang lebih optimal sehingga dapat mendukung pemenuhan permintaan terhadap komoditas dan produk utama nikel, (ii) akselerasi pengembangan usaha dengan memiliki manajemen yang lincah, kompositif, dan efisien dalam pengelolaan komoditas dan peluang bisnis, dan (iii) membuka peluang kerja sama strategis guna melakukan pengembangan usaha dan mengoptimalkan peluang bisnis kedepan.

Adapun pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni (opt-out) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUP, dimana perseroan melakukan efektif, akan mengkalikan sebagian aset dan pasiva Perseroan beserta karena hukum kepada (1) satu perseroan lain yang telah menerima perjanjian, dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut telah ada.

Dengan demikian, Perseroan akan melaksanakan Pemisahan aset dan pasiva kepada (2) dua anak perusahaan Perseroan, yaitu NKA dan SDA, dimana perseroan saham Perseroan dalam (2) anak perusahaan tersebut masing-masing adalah sebesar lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat Perseroan telah melakukan pemisahan tersebut, maka perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sebesar lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Perseroan ini merupakan transaksi yang dilakukan dari ketentuan transaksi material atau transaksi afiliasi. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUP, Perseroan mengumumkkan Rancangan Pemisahan ini melalui (1) satu surat kabar harian dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.antenatam.com).

Perseroan akan menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diundangnya Rancangan Pemisahan.

BAB II KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, NKA DAN SDA

A. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

UMUM
Perseroan didirikan dengan nama "Persusahaan Negeri (PN) Aneka Tambang" di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1989 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1989. Perseroan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 5 Juli 1989, Tambahan No. 36. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1974, status Perseroan diubah dari "Persusahaan Negeri menjadi Persusahaan Negeri Perseroan Terbatas" ("Persusahaan Perseroan") dan sejak itu dikenal sebagai "Persusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan No. 320 tanggal 30 September 1974 yang dibuat di hadapan Wanda Sungkar Arundum, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta pengganti dari Abdul Latief, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 55 tanggal 14 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan status Perseroan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1969 tentang Pendaftaran Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang bentuk-bentuk Usaha Negeri menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21 dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 33) yang Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1768/MK/VI/121974, tentang Penetapan Modal Pemisahan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 14.S/7174 tanggal 21 Mei 1975 dan kedua akta tersebut telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Pengagat Negeri, Jakarta berdasarkan Akta No. 1766 tanggal No. 1737 tanggal 21 Mei 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 5 Juli 1975, Tambahan No. 312.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan yang diselesaikan dengan UUP, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 15/2020 dan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kantor Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 103/2022"). Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 2022 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., persetujuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menkumham selubung dengan Akta No. 103/2022 sedang dalam proses.

Perseroan memiliki modal dan tujuan untuk bergerak dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, serta optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendukung upaya keuangan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Struktur pemilikan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 14/2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT Deltano Entyrom adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100 per saham			
Pemegang Saham	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dawisma	1	100	-
Saham Seri B	37.999.999.999	3.799.999.999.900	-
Modal Ditipkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
PT Indonesia Asah Aluminium (Persero)	1	100	0,00
Saham Seri B	15.619.999.999	1.561.999.999.900	65,00
Publik			
Saham Seri B	84.070.754.725	84.070.372.500	35,00
Jumlah Modal Ditipkan dan Disetor Penuh	24.030.754.725	2.403.076.472.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portofolio	13.969.235.275	1.396.923.527.500	-

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Perseroan termasuk dalam Akta No. 103/2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Independen	Prof. F.X. Sulistyo M.A.
Komisaris Independen	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Komisaris Independen	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Komisaris	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Komisaris	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Komisaris	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Direksi	
Direktur Utama	Nicola D. Kantor
Direktur	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Direktur	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Direktur	Dr. F.X. Sulistyo M.A.
Direktur	Dr. F.X. Sulistyo M.A.

RANCANGAN PEMISAHAN SEBAGIAN SEGMENT USAHA PERTAMBANGAN NIKEL PT ANEKA TAMBANG Tbk “RANCANGAN PEMISAHAN”

INFORMASI INTI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang diumumkan dalam Rancangan Pemisahan ini dan menegaskan bahwa informasi yang diumumkan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diumumkan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT ANEKA TAMBANG Tbk (“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.

Kantor Pusat:

Gedung Aneka Tambang Tower A
Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530, Indonesia
Telepon: +62 21 789 1234
email: corsec@antam.com
website: www.antenatam.com

Rancangan Pemisahan dibuat sehubungan dengan pemisahan sebagian segment usaha pertambangan nikel dimana Perseroan akan mengalihkan aset dan liabilitas yang terkait dengan usaha pertambangan nikel Perseroan yang berlokasi di Halmaheira Timur, Maluku Utara, kepada PT Nusa Karya Arindo dan PT Sumberdaya Arindo, anak perusahaan terkendali Perseroan yang keduanya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%.

Pengumuman atas Rancangan Pemisahan ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta memenuhi pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi.

PT Nusa Karya Arindo dan PT Sumberdaya Arindo merupakan perusahaan terkendali Perseroan, dimana Perseroan merupakan pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 99% di masing-masing PT Nusa Karya Arindo dan PT Sumberdaya Arindo, sehingga transaksi Pemisahan merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020. Perseroan akan mengumumkkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Pemisahan dan menyampaikan laporan dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diundangnya Rancangan Pemisahan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015.

Keberatan atas Rencana Pemisahan ini dapat disampaikan oleh kreditur kepada Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada tanggal 15 Juli 2022.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, para kreditur Perseroan tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditur tersebut dianggap menyetujui Rencana Pemisahan.

Rancangan Pemisahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Jumlah Aset	32.916.154	31.729.513	30.194.907	
Jumlah Liabilitas	12.079.056	12.690.064	12.061.488	
Jumlah Ekuitas	20.837.098	19.039.449	18.133.419	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	32.916.154	31.729.513	30.194.907	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Laba Usaha	2.738.144	2.032.303	955.614	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.043.509	1.641.178	687.034	
Beban Pajak Penghasilan	(1.181.769)	(491.824)	(493.182)	
Laba Bersih	1.861.740	1.149.354	193.852	
Penghasilan(Rugi) Komprehensif Lain, Setelah Pajak	338.182	(175.476)	(202.750)	
Jumlah Penghasilan(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.199.922	973.878	(8.898)	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data posisi keuangan NKA berdasarkan laporan keuangan NKA yang telah diaudit untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Jumlah Aset	32.916.154	31.729.513	30.194.907	
Jumlah Liabilitas	12.079.056	12.690.064	12.061.488	
Jumlah Ekuitas	20.837.098	19.039.449	18.133.419	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	32.916.154	31.729.513	30.194.907	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data posisi keuangan NKA berdasarkan laporan keuangan NKA yang telah diaudit untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Jumlah Aset	32.916.154	31.729.513	30.194.907	
Jumlah Liabilitas	12.079.056	12.690.064	12.061.488	
Jumlah Ekuitas	20.837.098	19.039.449	18.133.419	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	32.916.154	31.729.513	30.194.907	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data posisi keuangan NKA berdasarkan laporan keuangan NKA yang telah diaudit untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Jumlah Aset	32.916.154	31.729.513	30.194.907	
Jumlah Liabilitas	12.079.056	12.690.064	12.061.488	
Jumlah Ekuitas	20.837.098	19.039.449	18.133.419	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	32.916.154	31.729.513	30.194.907	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN				
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data posisi keuangan NKA berdasarkan laporan keuangan NKA yang telah diaudit untuk posisi 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.				
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	
Jumlah Aset	32.916.154	31.729.513	30.194.907	
Jumlah Liabilitas	12.079.056	12.690.064	12.061.488	
Jumlah Ekuitas	20.837.098	19.039.449	18.133.419	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	32.916.154	31.729.513	30.194.907	

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas				3.949	6.918	9.116
Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NKA berdasarkan Laporan Keuangan NKA yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.						
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
Keterangan	31 Des 21	31 Des 20	31 Des 19	Keterangan	Sebelum Pemisahan 31 Desember 2021 (Audited)	Pengyesuan yang diperlukan dalam proses Pemisahan 31 Desember 2021 (Proforma)
Rugi Usaha	(2.205)	(209)	(547)	Jumlah Aset	28.553	435.784
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(2.193)	(870)	(4.178)	Jumlah Liabilitas	20.145	75.695
Beban Pajak Penghasilan				Jumlah Ekuitas	-8.476	966.170
Bukti Bersih		(870)	(4.178)			

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS		
IDX or Indonesia Stock Exchange	:	The party that organizes and provides a system and/or the means to bring together the offers to buy and sell securities of other parties with the purpose of trading the securities between them, which in this case is the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia), domiciled in South Jakarta, or any of its successors, assignees and transferees.
BNRI	:	State Gazette of the Republic of Indonesia.
BPHTS	:	Fee for the Acquisition of Rights on Land and/or Buildings.
MIND ID Group	:	PT Indonesia Aashan Aluminium (Persero) and its subsidiaries.
MoLHR (Kemendikham)	:	Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as amended from time to time.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Minister of Law and Human Rights	:	Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as amended from time to time.
NKA	:	PT Nusa Karya Arindo.
Ortoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) or OJK	:	An independent institution as referred to in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, as amended from time to time ("OJK Law"), whose duties and authorities include regulating and supervising financial service activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financing institutions and other financial institutions, where as of December 31, 2012, OJK is the institution that replaced and accepted the rights and the obligations to carry out the regulatory and supervisory functions of the Capital Market Supervisory Agency (Badan Pengawas Pasar Modal or "Bappep") and/or Bappep dan Lembaga Keuangan ("Bappep-LK") in accordance with the provisions of Article 55 of the OJK Law.
Spin-Off	:	A spin-off of the Company's partial segment of nickel mining business by transferring a portion of the assets and liabilities related to the Company's nickel mining business located in East Halmahera, North Maluku, to NKA and SDA, the Company's controlled subsidiaries, both of which are more than 99% owned by the Company directly or indirectly.
Company	:	PT Aneka Tambang Tbk
PKP	:	Taxable Employer.
PMK 56 of 2021	:	Regulation of the Minister of Finance Number 52/PMK.010/2017 concerning Use of Book Value for Transfer and Acquisition of Assets in the Context of Merger, Consolidation, Expansion, or Business Acquisition, as last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 58/PMK.010/2021.
POJK No. 33/2014	:	OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company dated December 8, 2014.
POJK No. 31/2015	:	OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company dated December 22, 2015.
POJK No. 30/2017	:	OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Share Buy-back Issued by Public Company dated June 22, 2017.
POJK No. 15/2020	:	OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company dated April 21, 2020.
POJK No. 17/2020	:	OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities dated April 21, 2020.
POJK No. 42/2020	:	OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions dated July 2, 2020.
PP 34/2016	:	Government Regulation No. 34 of 2016 concerning Income Tax on Sale from the Transfer of Rights on Land and/or Buildings, and on Income and Purchase Agreement on Land and/or Buildings and its Amendments.
Ph	:	Income tax (Pajak Penghasilan).
PPN	:	Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai).
PSAK	:	Statement of Financial Accounting Standards (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), which is part of Financial Instruments in Indonesia.
Spin-Off Plan	:	Spin-Off Plan prepared by the Company in connection with the Spin-Off.
EGMS	:	The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with the aim of approving the Spin-Off plan which is planned to be held on August 23, 2022.
SDA	:	PT Sumberdaya Arindo.
Affiliated Transaction	:	Transactions as defined in POJK No. 42/2020.
Job Creation Law	:	Law No. 11 of 2020 dated November 2, 2020 concerning Job Creation, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 245 of 2020.
Labour Law	:	Law No. 13 of 2003 dated March 25, 2003 concerning Manpower, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 of 2003, Supplement to No. 4279 as amended by the Job Creation Law.
Capital Market Law	:	Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning the Capital Market, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 64 of 1995, Supplement to No. 3608.
Income Tax Law	:	Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 246 of 2021, Supplement to No. 6736.
VAT Law	:	Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 246 of 2021, Supplement to No. 6736.
Company Law	:	Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106 of 2007, Supplement to No. 4756 as amended by the Job Creation Law.

The titles of the clauses in this Spin-Off Plan are only intended as convenience in making a reference and shall not be used in the construction of the contents of this Spin-Off Plan.

This Spin-Off Plan has made reference to the Company Law. This Spin-Off Plan is prepared and submitted to the authorities, the public and employees of the Company in order to comply with the principle of information disclosure. Therefore, in accordance with the applicable regulations, this Spin-Off Plan will be published in national newspapers which shall also contain the notification regarding the time given to all parties, especially for the Company's creditors to submit objections (if any).

CHAPTER II. RECIPE

Today's environmental problems have raised both challenges and opportunities at the same time. The existing environmental problems in the form of greenhouse gas emissions has been accounted for as many as 42 gigatons of gas emissions induced by human actions. According to the Ministry of Energy and Mineral Resources data as well as 25% twenty three percent of this figure comes from the exhaust gas from the transportation vehicles that use fossil fuels. This has the risk of increasing the earth's temperature by 4 (four) °C which has a potential to melt the Himalayan glaciers very quickly and resulted in natural disasters.

In 2017, the total CO2 emission produced in the world was 38.2 billion tons, of which 19 billion tons or about 53% (thirty three percent) of the total global CO2 production, was produced by China. In that year, Indonesia produced 487 million tons of CO2 gas. These greenhouse gas emissions are dominated by the burning of fossil fuels from commercial cars, trucks, ships, trains, and planes which use petroleum in the form of gasoline and diesel.

This condition is both a challenge and an opportunity for the MIND ID Group (in this case represented by the Company) to initiate a renewable energy development plan.

One of the developments of renewable energy is to establish the electric vehicle (EV) ecosystem. In early 2020, the sale and use of EV on a commercial scale has been initiated. According to the analysis of the Boston Consulting Group, the trend of EV use will continue to increase from year to year with an estimated 30% of EV use in 2035, followed by the use of Hybrid & Mild Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Vehicle (PHEV) and Battery Electric Vehicle (BEV).

The increasing trend in EV use has created an increasing need for battery storage (EV Battery) as the energy source of the EV. The main raw material for the manufacture of EV Battery is nickel. According to the sources from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the growth of renewable energy for battery storage has increased by 79% (seventy-nine percent) per year. South Korea, Japan and the United States are the three countries that experienced the highest growth, where the EV battery capacity of 1,787 MWh can be produced by South Korea, 1,587 MWh can be produced by Japan and 1,270 MWh can be produced by the United States. On the other hand, China can produce EV battery with a capacity of 705 MWh.

ANTAM as one of the second largest nickel resources in Indonesia has the initiative to take advantage of the increasing trend of EV use by participating in the development of the EV Battery industry ecosystem. One of the Company's first steps to support the use of EV battery is to conduct a partial spin-off of the assets and liabilities related to the Company's nickel mining business located in East Halmahera, North Maluku, to its subsidiaries, NKA and SDA. The benefits of this spin-off are (i) to develop and manage assets more optimally so that they can support the fulfillment of demand for nickel processed commodities and products, (ii) to accelerate business opportunities by having a focused, committed, and flexible management in decision making and business opportunities, and (iii) to open up any opportunities for strategic cooperation to develop business and anticipate future business opportunities.

The spin-off that will be carried out by the Company is an inure spin-off as referred to in article 135 paragraph (1) letter b and paragraph (3) of the Company Law, which after the spin-off is effective, it will result in a portion of the assets and liabilities of the Company being transferred by law to 1 (one) or more company or companies that receive the transfer, and the company who did the Spin-Off shall still exist.

Therefore, the Company will carry out the Spin-Off of assets and liabilities to 2 (two) subsidiaries of the Company, namely NKA and SDA, where the Company's share ownership in these 2 (two) subsidiaries is more than 99% (ninety nine percent) respectively, either directly or indirectly. Considering that the Spin-Off is carried out to 2 (two) subsidiaries which are more than 99% (ninety nine percent) owned by the Company either directly or indirectly, then this Spin-Off is a transaction that is excluded from the provisions of material transactions or affiliated transactions. To comply with the provisions of Article 127 paragraph (2) of the Company Law, the Company shall announce the Spin-Off Plan through 1 daily newspaper and the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id) and the Company's website (www.antam.com).

The Company will submit a report to the Financial Services Authority and announce it through the Indonesia Stock Exchange website to comply with the provisions of POJK No. 17/2020, POJK No. 42/2020 and POJK No. 31/2015, no later than 2 (two) business days after the execution date of the Spin-Off Deed.

CHAPTER III. INFORMATION ABOUT THE COMPANY, NKA AND SDA

A. INFORMATION ABOUT THE COMPANY

GENERAL
The Company was established under the name "Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang" in the Republic of Indonesia on July 5, 1969 under Government Regulation No. 22 of 1969. The establishment was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 56 dated July 5, 1969, Supplement No. 36. On September 14, 1974, under Government Regulation No. 26 of 1974, the status of the Company was changed from a State Company (Perusahaan Negara) to a State Limited Liability Company (Perusahaan Negara Perseroan Terbatas) (Limited Liability Company) and has since been known as "Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang".

The Company was established under the Company's Deed of Establishment No. 320 dated September 30, 1974, drawn up before Warda Sungkar Alimudin, S.H., a Notary in Jakarta in lieu of Abdul Latief, S.H., a Notary in Jakarta, jo. Deed of Amendment No. 55 dated March 14, 1975, drawn up before Abdul Latief, S.H., a Notary in Jakarta, regarding the change in the status of the Company in order to implement the provisions contained in Law No. 9 of 1969 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 1969 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1969 No. 16, Supplement to the State Gazette No. 289) concerning the forms of State Enterprises into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1969 No. 40), Government Regulation No. 12 of 1969 concerning Limited Liability Companies (Persero), the State Gazette of the Republic of Indonesia of 1969 No. 21 and Government Regulation No. 26 of 1974 concerning Changes in Aneka Tambang in the form of a State Company to a Limited Liability Company (Persero), (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 of 1974) and a Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep.1768/MK/VI/121974, concerning Determination of the Capital of Limited Liability Company (Persero) PT Aneka Tambang to keep a Limited Liability Company under the name PT Aneka Tambang, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. YAS/1704 dated May 21, 1975 and both deeds have been registered in the Registration Book at Jakarta District Court No. 1746 and No. 1737 dated May 27, 1975, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 52 dated July 1, 1975, Supplement No. 312. The Company's Articles of Association have been amended several times, including the amendments to comply with Company Law, POJK No. 33/2014, and POJK No. 15/2020 and the latest amendment as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 103 dated June 16, 2022, drawn up before Jose Dima Siahaan, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City ("Deed No. 103/2022"). Based on Statement letter dated June 22, 2022, from Notary Jose Dima Siahaan, S.H., M.Kn., the approval of amendment of article of association and the receipt of notification on amendment to the articles of association from the Minister of Law and Human Rights in connection with Deed No. 103/2022 is still in progress.

The Company has the intent and purpose to engage in the mining of various types of minerals, and to carry out business in the industry, trade, transportation and services fields related to the mining of these various types of minerals, as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to gain surplus profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

COMPANY SHARE OWNERSHIP STRUCTURE
The Company's capital structure and shareholder composition based on Deed No. 14/2021 and the Company's Register of Shareholders as of May 31, 2022, issued by PT Dalindo Entycom are as follows:

Shareholders	Nominal Value IDR100 per share		
	Share	Rupiah	%
Authorized capital			
Dwiwarna Series A Share	1	100	-
Series B Share	37,999,999,999	3,799,999,999,900	-
Fully Issued and Paid-Up Capital			
Republic of Indonesia			
Dwiwarna Series A Share	1	100	0.00
PT Indonesia Aashan Aluminium (Persero)			
Series B Share	15,619,999,999	1,561,999,999,900	65.00
Public			
Series B Share	8,410,764,725	841,076,372,500	35.00
Total Fully Issued and Paid-Up Capital	24,030,764,725	2,403,076,472,500	100.00
Total Amount of Unissued Shares	13,969,235,275	1,396,923,527,500	-

MANAGEMENT AND SUPERVISION
As stated in the Deed No. 103/2022, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is as follows:

Board of Commissioners	
President/Commissioner/Independent Commissioner :	Ir. F.X. Suljastopo M.A.
Independent Commissioner :	Prof. Dr. Soez. Gumilar Rusliwa Samantri
Independent Commissioner :	Ir. Arang Sri Kuswardono
Commissioner :	Korjen. Pol. Drs. Bambang Sarunawabo, S.H., M.Hum.
Commissioner :	Ir. Dito Seno Widagdo, M.M.
Board of Directors	
President/Director :	Nicolas D. Karier
Director :	I Dewa Bagus Sugita Wirantaya
Director :	Dodik Robert Siaban
Director :	Elisabeth RT Siahaan
Director :	Basar Simanjuntak

SPIN-OFF PLAN OF PARTIAL SEGMENT OF NICKEL MINING BUSINESS OF PT ANEKA TAMBANG Tbk ("SPIN-OFF PLAN")

THIS INFORMATION IS IMPORTANT TO NOTE	
If you have any difficulty in understanding this information or are in doubt in making any decision, we recommend that you consult any securities broker, investment manager, legal consultant, accountant or other professional adviser.	
The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, individually or jointly, are responsible for the completeness and correctness of all material information or facts contained in this Spin-Off Plan and confirm that the information presented is true and there are no undisclosed material facts which may cause this information to be misleading.	



PT ANEKA TAMBANG Tbk

("Company")

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Main Business Activities:
The mining of various types of minerals, and conducting business in the industry, trade, transportation and services fields related to the mining of various types of minerals.

Head Office:
Gedung Aneka Tambang Tower A
Jl. Leijen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530, Indonesia
Telepon. +62 21 789 1234
email: corsec@antam.com
website: www.antam.com

The Spin-Off Plan was made in connection with the spin-off of partial segment of mining business through which the Company will transfer its assets and liabilities related to the Company's nickel mining business located in East Halmahera, North Maluku, to PT Nusa Karya Arindo and PT Sumberdaya Arindo, the Company's controlled subsidiaries, both of which are more than 99% owned by the Company directly or indirectly.

The announcement of the Spin-Off Plan is made in order to comply with the provisions in Article 127 paragraph (2) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to fulfill the Disclosure of Information principle regarding the Proposed Transaction.

PT Nusa Karya Arindo and PT Sumberdaya Arindo are controlled companies of the Company, where the Company is a shareholder both directly and indirectly of more than 99% shares in PT Nusa Karya Arindo and PT Sumberdaya Arindo, respectively, therefore the Spin-Off transaction is a transaction that is excluded from the provisions of POJK No. 17/2020 and POJK No. 42/2020. The Company will announce the disclosure of information to the public regarding the Spin-Off and submit the reports and the supporting documents to OJK no later than 2 (two) business days after the execution date of the Spin-Off Deed to comply with POJK No. 17/2020, POJK No. 42/2020 and POJK No. 31/2015.

Any objections to this Spin-Off Plan can be submitted by the creditors to the Company in writing no later than 4 PM Western Indonesia Time on July 15, 2022. In the event that until the specified time limit, the Company's creditors do not submit their objections, then the creditors shall be deemed to have approved the Spin-Off Plan.

This Spin-Off Plan is published in Jakarta on July 1, 2022

FINANCIAL DATA OVERVIEW
The table below describes a summary of the Company's consolidated financial position data based on the Company's audited consolidated financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Notes	Dec 31, 21	Dec 31, 20	Dec 31, 19
Total Assets	32,916,154	31,729,513	30,194,907
Total Liabilities	12,079,056	12,079,064	12,061,488
Total Equity	20,837,098	19,650,449	18,133,419
Total Liabilities and Equity	32,916,154	31,729,513	30,194,907

The table below describes a summary of the Company's consolidated profit and loss and other comprehensive income data based on the Company's audited consolidated financial statements for the years ended on December 31, 2021, 2020 and 2019.

Notes	Dec 31, 21	Dec 31, 20	Dec 31, 19
Operating Profit	2,738,144	2,032,303	955,614
Profit Before Income Tax	3,043,509	1,641,178	687,304
Income Tax Expense	(1,181,769)	(491,824)	(493,182)
Net Profit	1,861,740	1,149,354	193,852
Other Comprehensive Income (Loss), After Tax	338,182	(175,478)	(202,750)
Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	2,199,922	973,876	(6,898)

B. INFORMATION ABOUT NKA
GENERAL
NKA was established under the Deed of Establishment No. 6 dated June 7, 2012, drawn up before Lotani Kurniati Indram-Hoes, S.H., LL.M., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-08091.AH.01.01.Tahun 2012 dated July 16, 2012 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0063890.AH.01.09.Tahun 2012 dated July 16, 2012, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 41 dated May 21, 2013, Supplement No. 45121.

NKA's Articles of Association have been amended several times, including the amendments to comply with the Company Law, and the latest amendment as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 9 dated April 22, 2022, drawn up before Ervina Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., a Notary in Bogor City, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0029620.AH.01.02.TAHUN 2022 dated April 24, 2022, and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-008125A.AH.01.11.TAHUN 2022, dated April 24, 2022 ("Deed No. 9/2022").

NKA has the intent and purpose to engage in the exploration and production operations fields for nickel ore mining and processing.

NKA SHARE OWNERSHIP STRUCTURE
The NKA's capital structure and shareholders composition based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 7 dated October 27, 2020, drawn up before Ervina Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., a Notary in Bogor City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Notification of Amendment of the Articles of Association Receipt No. AHU-AH.01.03-0403803 dated November 4, 2020 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0104741.AH.01.11.TAHUN 2022 dated April 24, 2022, and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-008125A.AH.01.11.TAHUN 2022, dated April 24, 2022 ("Deed No. 9/2022").

Shareholders	Nominal Value IDR100,000 per share		
	Share	Rupiah	%
Authorized capital	700,000	70,000,000,000	-
Fully Issued and Paid-Up Capital			
PT Aneka Tambang Tbk	277,200	27,720,000,000	99
PT Adani Resourcindo	2,800	280,000,000	1
Total Fully Issued and Paid-Up Capital	280,000	28,000,000,000	100.00
Total Amount of Unissued Shares	420,000	42,000,000,000	-

MANAGEMENT AND SUPERVISION
As stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 11 dated August 18, 2021, drawn up before Ervina Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., a Notary in Bogor City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Notification of Alteration of Company Data Receipt No. AHU-AH.01.03-0440713 dated August 26, 2021 and has been registered in the Company Registry at the MoLHR under No. AHU-004741.AH.01.11.TAHUN 2022 dated August 26, 2021 the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of NKA, is as follows:

Board of Commissioners	
Commissioner :	Kurto Hendaparako
Board of Directors	
Director :	Muhidin

FINANCIAL DATA OVERVIEW
The table below describes a summary of NKA's financial position data based on NKA's audited financial statements as at December 31, 2021, 2020 and 2019.

Notes	Dec 31, 21	Dec 31, 20	Dec 31, 19
Operating Loss	5,949	8,016	9,818
Total Assets	495	370	1,300
Total Liabilities	5,454	7,648	8,518
Total Liabilities and Equity	5,949	8,016	9,818

The table below describes a summary of NKA's profit and loss and other comprehensive income data based on NKA's audited financial statements for the years ended on December 31, 2021, 2020 and 2019.

Notes	Dec 31, 21	Dec 31, 20	Dec 31, 19
Operating Loss	(2,193)	(269)	(647)
Loss Before Income Tax	(2,193)	(870)	(4,178)
Income Tax Expense	-	-	-
Net Loss	(2,193)	(870)	(4,178)
Other Comprehensive Income, After Tax	-	-	-
Total Comprehensive Loss for the Year	(2,193)	(870)	(4,178)

C. INFORMATION ABOUT SDA
GENERAL
SDA was established under the Deed of Establishment No. 93 dated June 21, 2012, drawn up before Mala Mukti, S.H., LL.M., a Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-03716.AH.01.01.Tahun 2013 dated January 31, 2013 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0005336.AH.01.09.Tahun 2013 dated January 31, 2013.

SDA's Articles of Association have been amended several times, including the amendments to comply with the Company Law, and the latest amendment as stated in the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution No. 3 dated April 22, 2022, drawn up before Niken Wahyuningrum, S.H., M.Kn., a Notary in South Tangerang City, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0026653.AH.01.02.TAHUN 2022 dated April 25, 2022 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0081353.AH.01.11.TAHUN 2022 dated April 25, 2022 ("Deed No. 3/2022").

SDA has the intent and purpose to engage in the exploration and production operations fields for nickel ore mining and processing.

SDA SHARE OWNERSHIP STRUCTURE
SDA's capital structure and shareholder composition based on the Deed of Decision of the Shareholders No. 7 dated October 27, 2020, drawn up before Niken Wahyuningrum, S.H., M.Kn., a Notary in South Tangerang City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Notification of Amendment of the Articles of Association Receipt No. AHU-AH.01.03-0403780 dated November 4, 2020 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0104741.AH.01.11.TAHUN 2022 dated November 4, 2020 and Deed No. 3/2022 are as follows:

Shareholders	Nominal Value of IDR100,000 per share		
	Share	Rupiah	%
Authorized Capital	200,000	20,000,000,000	-
Fully Issued and Paid-Up Capital			
PT Aneka Tambang Tbk	133,650	13,365,000,000	99
PT Adani Resourcindo	1,350	135,000,000	1
Total Fully Issued and Paid-Up Capital	135,000	13,500,000,000	100.00
Total Amount of Unissued Shares	65,000	6,500,000,000	-

MANAGEMENT AND SUPERVISION
As contained in (i) Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 2 dated January 18, 2021, drawn up before Niken Wahyuningrum, S.H., M.Kn., a Notary in South Tangerang City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Notification of Alteration of Company Data Receipt No. AHU-AH.01.03-0029474 dated January 19, 2021 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0005533.AH.01.11.TAHUN 2021 dated January 19, 2021 and (ii) Deed of Statement of Shareholders' Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 6 dated September 6, 2021, drawn up before Niken Wahyuningrum, S.H., M.Kn., a Notary in South Tangerang City, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Notification of Alteration of Company Data Receipt No. AHU-AH.01.03-0446502 dated September 10, 2021 and has been registered in the Company Registry maintained by the MoLHR under No. AHU-0154489.AH.01.11.TAHUN 2021 dated September 10, 2021, SDA's composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is as follows:

Board of Commissioners	
Commissioner :	Hendra Wijayanto
Board of Directors	
Director :	Ir. Yudi Agus Susanto

FINANCIAL DATA OVERVIEW
The table below describes a summary of SDA's financial position data based on SDA's audited financial statements as at December 31, 2021, 2020 and 2019.

Notes	Dec 31, 21	Dec 31, 20	Dec 31, 19
Total Assets	28,583	69,354	58,880
Total Liabilities	20,145	55,138	48,537
Total Equity	8,438	14,216	9,54